

**LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT I  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
TAHUN 2018**

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan sebagai salah satu instansi Pemerintah, wajib untuk memberikan layanan keterbukaan informasi publik.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang merupakan unit eselon I di Kementerian Keuangan berkomitmen turut mendukung Kementerian Keuangan dalam pemberian layanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut di atas.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

DJPK telah memiliki Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah (RPTKD) yang telah dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya. Pelayanan permohonan informasi dapat dilakukan melalui RPTKD, ataupun saluran telepon, faksimili, surat, email, website DJPK ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)), dan sejak bulan Agustus 2018 lalu permohonan informasi juga dapat dilakukan melalui *Call Center* DJPK (Dering DJPK 155420). Sarana dan prasarana tersebut memudahkan pemohon menyampaikan permohonan informasi publik kepada DJPK.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Layanan Informasi Publik

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan disebutkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan DJPK dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, selaku PPID Tingkat I DJPK. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Tingkat I DJPK dibantu unit struktural di bawahnya yaitu Subbagian Kehumasan, Bantuan Hukum, dan Kerjasama Antar Lembaga, Bagian Umum, Kehumasan dan Bantuan Hukum, Sekretariat DJPK.

c. Anggaran Layanan Informasi Publik

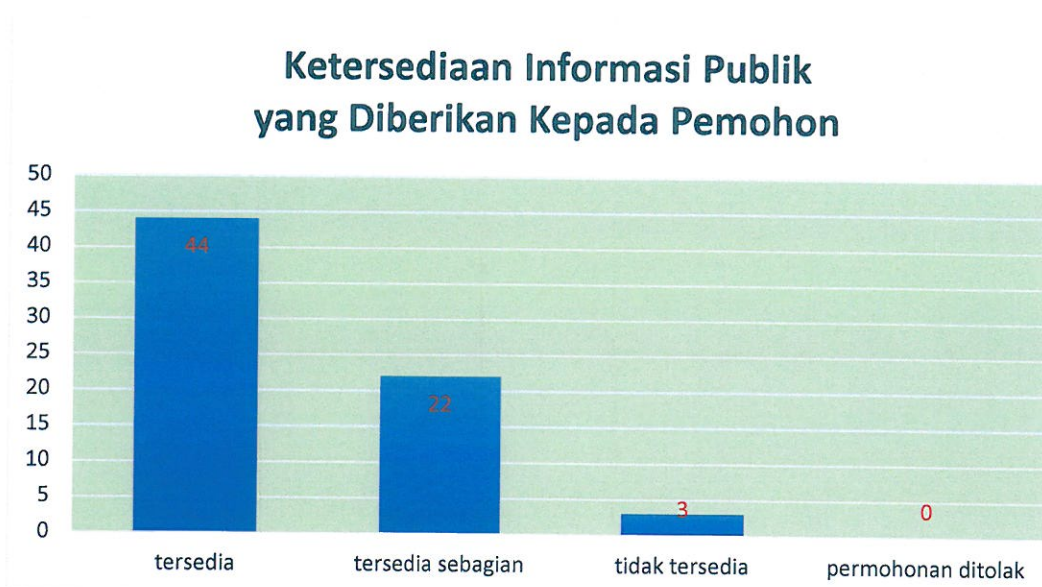
Beban biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas PPID ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DJPK (Subbagian Kehumasan, Bantuan Hukum dan Kerjasama Antar Lembaga, Bagian Umum, Kehumasan dan Bantuan Hukum, Sekretariat DJPK).

3. Rincian Layanan Informasi Publik

Selama kurun tahun 2018, PPID Tingkat I DJPK menerima sebanyak 69 (enam puluh sembilan) permohonan informasi publik, yang seluruhnya merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan (Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan).

Dari informasi publik yang disediakan oleh PPID Tingkat I DPK kepada pemohon, dapat dirinci sebagai berikut :

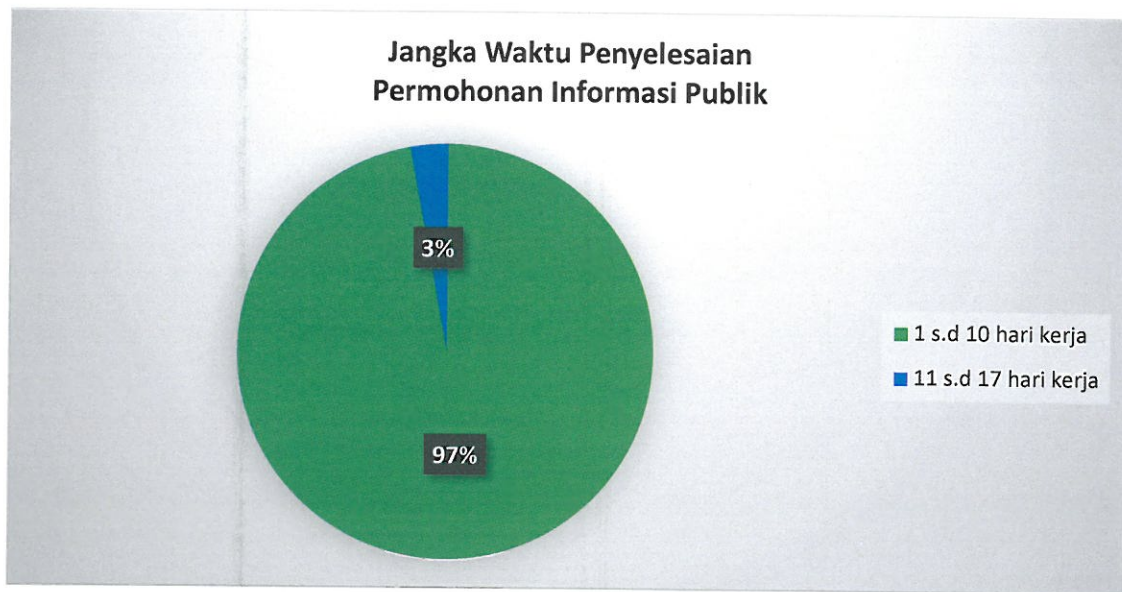
- a) Permohonan informasi publik yang dapat disediakan seluruhnya sebanyak 44 (empat puluh empat) permohonan;
- b) Permohonan informasi publik yang dapat disediakan hanya sebagian sebanyak 22 (dua puluh dua) permohonan;
- c) Permohonan informasi publik yang tidak dapat diberikan seluruhnya sebanyak 3 (tiga) permohonan, karena informasi yang diminta tidak dalam penguasaan DJPK.



Permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dirinci berdasarkan jangka waktu penyelesaian adalah sebagai berikut :

- a) Permohonan informasi publik yang ditanggapi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebanyak 67 (enam puluh tujuh) permohonan;
- b) Permohonan informasi publik yang ditanggapi dalam jangka waktu 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) hari kerja sebanyak 2 (dua) permohonan.

Rata-rata waktu penyelesaian informasi publik adalah 6,4 (enam koma empat) hari kerja.



#### 4. Rincian Penyelesaian Sengketa informasi Publik

PPID Tingkat I DJPK tidak menerima permohonan keberatan sepanjang tahun 2018.

#### 5. Capaian Tahun 2018

Capaian PPID tingkat I DJPK selama tahun 2018 adalah :

- a. Berkoordinasi dengan unit Eselon II di lingkungan DJPK dalam hal memetakan usulan informasi publik dan informasi publik yang dikecualikan;
- b. Melaksanakan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan dengan PPID Kementerian Keuangan;
- c. Beberapa pegawai DJPK telah mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIPPID Kementerian Keuangan;
- d. Penambahan informasi dan update informasi pada *website* DJPK (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>) telah dilakukan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) kali sepanjang tahun 2018;
- e. *Call Center* Dering DJPK 1500420 mulai berfungsi sejak bulan Agustus 2018;
- f. Rata-rata waktu penyediaan informasi publik terhadap 69 (enam puluh sembilan) permohonan adalah sebanyak 6,4 (enam koma empat) hari kerja;
- g. Menetapkan IKU terkait PPID sebagai IKU *mandatory* yaitu "Persentase Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik" dengan target capaian 100%.

#### 6. Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik bagi PPID Tingkat I DJPK antara lain :

- a. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan informasi publik di lingkungan DJPK, khususnya terkait peraturan tentang keterbukaan informasi publik dan batasan waktu pemberian tanggapan atas permohonan informasi publik;
  - b. Beragamnya data atau informasi yang diminta oleh publik sehingga terkadang unit teknis membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengolah datanya.
7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPK yaitu perlunya pelaksanaan peningkatan pemahaman akan keterbukaan informasi publik di lingkungan DJPK, sehingga semua unit di lingkungan DJPK diharapkan dapat mendukung percepatan waktu penyelesaian permohonan informasi publik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Tingkat I DJPK.

Sekretaris Direktorat Jenderal  
selaku  
PPID Tingkat I DJPK



Rukijot

Pemohonan Informasi Publik

| No | Nomor Pendaftaran (1) | Tanggal Permohonan Masuk (2) | Penerus dari PPD (3)           | Nama Pemohon (4)       | Kedudukan Pemohon (5)  | Informasi yang Diminta (6)   | Jalur Pemohonan (7) | Tujuan Pengumpulan Informasi (8)                    | Bentuk Informasi (9)         | Nilai Perkiraan Biaya (10) | Tanggal Surat Pemberitahuan (11) | Tanggal Surat Pemberitahuan Perpanjang (12) | Tanggal Pengambilan Informasi (13)      | Keputusan PPD (14) | Waktu Pemeliharaan Informasi (15) | Tanggal Keberatan (16) | Tanggal Tanggapan (17) |
|----|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 71/PPID/KK/2018       | 03 Januari 2018              | Penunasan dari PPD Kementerian | Syifa Sofianisa R      | Warga Negara Indonesia | Data realisasi pelaksanaan pemerintah Kabupaten/Kota menurut fungsi kewenangan dan keamananan dan perlindungan sosial se Jawa barat tahun 2013-2016  |                     | Penelitian Thesis                                   | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan seluruhnya                    | 5                  |                                   |                        |                        |
| 2  | 47/PPID/KK/2018       | 29 Januari 2018              | Penunasan dari PPD Kementerian | Pudi Dwi Nugrahani     | Warga Negara Indonesia | Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah sejak tahun 2012 s.d 2016  |                     | Penulisan karya akhir pada Universitas Indonesia    | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan seluruhnya                    | 10                 |                                   |                        |                        |
| 3  | 60/PPID/KK/2018       | 08 Februari 2018             | Penunasan dari PPD Kementerian | Ike Agustih            | Warga Negara Indonesia | Anggaran dan Realisasi DAK Fisik dan NF Bidang Pendidikan Tahun 2017   |                     | Penyusunan Skripsi                                  | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan seluruhnya                    | 6                  |                                   |                        |                        |
| 4  | 51/PPID/KK/2018       | 09 Februari 2018             | Penunasan dari PPD Kementerian | Emil Muhammad          | Warga Negara Indonesia | Bidang realisasi DBH SDA tahun 2001-2016   |                     | Penyusunan Skripsi                                  | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan sebagian                      | 4                  |                                   |                        |                        |
| 5  | 71/PPID/KK/2018       | 14 Februari 2018             | Penunasan dari PPD Kementerian | Irawan Gunardi         | Warga Negara Indonesia | Data Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Kota Tahun 2012 s.d 2016 yang Ditindak menurut Fungsi, Unsur, dan Jenis Belanja.   |                     | Tugas Akhir Tesis UI                                | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan seluruhnya                    | 4                  |                                   |                        |                        |
| 6  | 80/PPID/KK/2018       | 22 Februari 2018             | Penunasan dari PPD Kementerian | Inggid                 | Warga Negara Indonesia | Belanja Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bnglat Kotakulupatan) selama periode 2000-2016   |                     | Mengembangkan Penelitian                            | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan sebagian                      | 4                  |                                   |                        |                        |
| 7  | 81/PPID/KK/2018       | 23 Februari 2018             | Penunasan dari PPD Kementerian | Agung Andjiojya        | Warga Negara Indonesia | Data Realisasi Bantuan Sosial Berdasarkan Jenis Bantuan Sosial Pada Setiap Klaster Berdasar Provinsi dan Kabupaten dan Tahun 2012 s.d 2016   |                     | Bahan Thesis  | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan seluruhnya                    | 4                  |                                   |                        |                        |
| 8  | 86/PPID/KK/2018       | 27 Februari 2018             | Penunasan dari PPD Kementerian | Awalia Sagi Ilayyah    | Warga Negara Indonesia | 1. LGF Anggaran (Fungsi) TA 2013, 2014, 2015, 2016<br>2. LGF Anggaran (Fungsi) TA 2013, 2014, 2015, 2016<br>3. LGF Anggaran (Fungsi) TA 2013, 2014, 2015, 2016   |                     | Varabel dalam penelitian adopsi                     | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan seluruhnya                    | 12                 |                                   |                        |                        |
| 9  | 89/PPID/KK/2018       | 28 Februari 2018             | Penunasan dari PPD Kementerian | Anna Sofiana           | Warga Negara Indonesia | Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pagu Realisasi) sektor pertanian dan industri tahun 1993-2006 dan tahun 2015-2017 per Provinsi. Belanja modal pemerintah (pagu realisasi) sektor jasa (konstruksi, energi, komunikasi, informasi dan transportasi) tahun 2006-2017 per Provinsi |                     | Penelitian  | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan sebagian                      | 8                  |                                   |                        |                        |
| 10 | 50/PPID/KK/2018       | 01 Maret 2018                | Penunasan dari PPD Kementerian | Adella Dita Hayyu      | Warga Negara Indonesia | LGF Realisasi APBD (fungsi) Perpropinsi tahun 2013,2014, dan 2015.   |                     | Referensi Tesis                                     | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan seluruhnya                    | 8                  |                                   |                        |                        |
| 11 | 91/PPID/KK/2018       | 01 Maret 2018                | Penunasan dari PPD Kementerian | Puti Dwi Nugrahani     | Warga Negara Indonesia | Relakuplasi laporan Realisasi APBD Provinsi tahun 2012-2016  |                     | Penulisan karya akhir pada Universitas Indonesia    | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan seluruhnya                    | 8                  |                                   |                        |                        |
| 12 | 92/PPID/KK/2018       | 02 Maret 2018                | Penunasan dari PPD Kementerian | Adella Dita Hayyu      | Warga Negara Indonesia | LGF Realisasi APBD (fungsi) Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016  |                     | Referensi Tesis                                     | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan sebagian                      | 9                  |                                   |                        |                        |
| 13 | 90/PPID/KK/2018       | 05 Maret 2018                | Penunasan dari PPD Kementerian | Adella Dita Hayyu      | Warga Negara Indonesia | LGF Realisasi APBD (fungsi) Perpropinsi tahun 2016   |                     | Referensi Tesis                                     | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan seluruhnya                    | 8                  |                                   |                        |                        |
| 14 | 97/PPID/KK/2018       | 07 Maret 2018                | Penunasan dari PPD Kementerian | Agung Andjiojya        | Warga Negara Indonesia | Data Realisasi Bantuan Sosial Berdasarkan Jenis Bantuan Sosial Pada Setiap Klaster Berdasar Provinsi dan Kabupaten dan Tahun 2012 s.d 2016   |                     | Bahan Thesis  | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Tidak diberikan seluruhnya tidak sesuai | 9                  |                                   |                        |                        |
| 15 | 100/PPID/KK/2018      | 07 Maret 2018                | Penunasan dari PPD Kementerian | Emil Muhammad          | Warga Negara Indonesia | Rincian Alokasi Pembagian DBH SDA tahun 2000-2017  |                     | Penyusunan Skripsi                                  | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan sebagian                      | 9                  |                                   |                        |                        |
| 16 | 101/PPID/KK/2018      | 07 Maret 2018                | Penunasan dari PPD Kementerian | Dwi Kawanib            | Warga Negara Indonesia | Data trend Alokasi Dana Alokasi Khusus/DAK dan Dana Bagi Hasil/DBH ke seluruh Provinsi dan Kab/Kota periode 2000-2017  |                     | Penelitian Doktoral (PhD) SOAS University of London | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan sebagian                      | 4                  |                                   |                        |                        |
| 17 | 104/PPID/KK/2018      | 08 Maret 2018                | Penunasan dari PPD Kementerian | Septian Sande Ezenza   | Warga Negara Indonesia | Realisasi Anggaran Infrastruktur berdasarkan Ite Provinsi se- Indonesia tahun 2011-2016  |                     | Penelitian Skripsi                                  | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan seluruhnya                    | 3                  |                                   |                        |                        |
| 18 | 117/PPID/KK/2018      | 23 Maret 2018                | Penunasan dari PPD Kementerian | Hilda Hilmanwati       | Warga Negara Indonesia | Data akses dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) per Kabupaten/Kota tahun 2010-2016   |                     | Ukuri Laporan studi (Tugas Akhir)                   | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan sebagian                      | 10                 |                                   |                        |                        |
| 19 | 124/PPID/KK/2018      | 26 Maret 2018                | Penunasan dari PPD Kementerian | Bambang Afatimi        | Warga Negara Indonesia | Realisasi APBD Kabupaten/Kota (Fungs) 2006-2017 Realisasi APBD Provinsi (Fungs) 2005-2017  |                     | Research  | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan sebagian                      | 10                 |                                   |                        |                        |
| 20 | 130/PPID/KK/2018      | 10 April 2018                | Penunasan dari PPD Kementerian | Abdulrahman Fachrudzoy | Warga Negara Indonesia | Data Anggaran (Fungs) tahun 2011 sampai 2016 dan data Realisasi (Fungs) tahun 2009-2016 untuk wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Bali   |                     | Pengujian Tugas Akhir (Skripsi)                     | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan sebagian                      | 7                  |                                   |                        |                        |
| 21 | 131/PPID/KK/2018      | 10 April 2018                | Penunasan dari PPD Kementerian | Luh Has Widanah        | Warga Negara Indonesia | Data Anggaran (Fungs) tahun 2011 sampai 2016 dan data Realisasi (Fungs) tahun 2009-2016 untuk wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Bali   |                     | Penelitian tugas akhir                              | Naskah Elektronik (softcopy) |                            |                                  |   | Diberikan sebagian                      | 7                  |                                   |                        |                        |

| No | SK/KK/PPID      | Tgl Pengajuan | Pemenuhan dari PPID            | Penyusun dari PPID   | Warga Negara Indonesia | Realisasi pelaksanaan paket daerah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2005-2016   | Pengerjaan Tugas Akhir (Skripsi)  | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya | No |
|----|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--|---|------------------------------|----------------------|----|
| 23 | 134/PPID.KKZ018 | 12 April 2018 | Penemuan dari PPID Kementerian | Dwi Kawanto          | Warga Negara Indonesia | 1) Data Trend Alokasi Dana Pelembangan (DAU/DBH dan DAK) berdasarkan perbandingan antara keputusannya alokasi dana (sesuai Perpres Rincian APBD) seluruh provinsi, Kabupaten/Kota periode 2005-2017. 2) Data Trend Dana Alokasi Khusus-Program Pembinaan Daerah Pemulihan(DAK-P2P) (Dana Aspirasi DPPI) selama beberapa tahun terakhir.  | Untuk mendukung penelitian doktoral di SORAS, University of Indonesia dengan dukungan keuangan pusat dan daerah   | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan sebagian   | 9  |
| 24 | 137/PPID.KKZ018 | 16 April 2018 | Penemuan dari PPID Kementerian | Asyifa Szami Iman    | Warga Negara Indonesia | 1. Belanja Modal Fungsi Kesehatan, APBD Realisasi Tingkat Kota/Kabupaten 2005 dan 2009 2. Belanja Pegawai Fungsi Kesehatan, APBD Realisasi Tingkat Kota/Kabupaten 2005 dan 2009 3. Belanja Barang Fungsi Kesehatan, APBD Realisasi Tingkat Kota/Kabupaten 2005 dan 2009 4. Pengeluaran Lain-lain Fungsi Kesehatan, APBD Realisasi Tingkat Kota/Kabupaten 2005-2013.5. FOSB per kepala tingkat Kota Kabupaten Tahun 2005-2013 6. PAD Tingkat Kota/Kabupaten Tahun 2005-2013                                 | Sebagai Referensi Skripsi dengan Judul: Studi Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Generasi (Stunting) Kerdi (Stunting) | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan sebagian   | 8  |
| 25 | 139/PPID.KKZ018 | 16 April 2018 | Penemuan dari PPID Kementerian | Devi Nadia Limbong   | Warga Negara Indonesia | Belanja Modal untuk "Gedung dan Bangunan" dan "Jalan, Irigasi, dan Saluran Air" pada APBD tahun 2011-2016 di semua kota di provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua*  | Data Skripsi  | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya | 6  |
| 26 | 139/PPID.KKZ018 | 20 April 2018 | Penemuan dari PPID Kementerian | Friti Dwi Suplani    | Warga Negara Indonesia | 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2000-2016 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Realisasi pendapatan pajak sektor hotel tahun 2000-2016 4. Realisasi penerimaan pajak sektor restoran tahun 2000-2016 pada 10 Kabupaten/Kota berikut: 1. Kota Denpasar 2. Kota Surabaya 3. Kota Batam 4. Kabupaten Cilacap 5. Kabupaten Bantul 6. Kabupaten Banyuwangi 7. Kabupaten Bogor 10. Kabupaten Bantul  | Pengisian Tugas Akhir (Skripsi)   | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan sebagian   | 7  |
| 27 | 142/PPID.KKZ018 | 25 April 2018 | Penemuan dari PPID Kementerian | Yusuf Arief Pratama  | Warga Negara Indonesia | a) Realisasi APBD Kabupaten/Kota berdasarkan fungsi kesehatan, pendidikan, dan perumahan dan fasilitas umum tahun 2010-2017; b) Realisasi APBD Provinsi menurut fungsi kesehatan, pendidikan, dan perumahan tahun 2010-2017; c) Total realisasi APBD pada setiap Kabupaten/Kota tahun 2010-2017, dan Provinsi tahun 2010-2017.   | Penyelesaian tugas kuliah   | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan sebagian   | 6  |
| 28 | 143/PPID.KKZ017 | 27 April 2018 | Penemuan dari PPID Kementerian | Charminia Sulisowati | Warga Negara Indonesia | "Penyetaraan modal (investasi) publik daerah per sektor pada Kabupaten Bangkalis, Prov. Riau,TA.2010-TA.2017"  | Penyusunan Skripsi  | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya | 10 |
| 29 | 145/PPID.KKZ018 | 27 April 2018 | Penemuan dari PPID Kementerian | Devi Nadia Limbong   | Warga Negara Indonesia | Belanja Modal untuk "Gedung dan Bangunan" dan "jaringan" untuk daerah dan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Nias Selatan, Nias Barat, Sokok Selatan, Musi Rawas, Lampung Barat, Bondowoso, Subono, Banglailan, Sampang, Pandeglang, Lombok, Sambas, Kelampayan, Kapuas Hulu, Hulu Sungai Utara, Sintang, Kuning, Korawa, Bontomatene, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Banggai Tengah, Muadung, Topu Ulu-ura, Pohuwato, Gorontalo Utara, dan semua kabupaten di Provinsi NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara. | Penyusunan Skripsi  | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya | 9  |
| 30 | 144/PPID.KKZ018 | 27 April 2018 | Penemuan dari PPID Kementerian | Yulian Funa          | Warga Negara Indonesia | Data LGS Realisasi (Fungsi) dan Tahun 2007 s.d 2016 1. Fungsi Bidang Kesehatan Pendidikan 2. Fungsi Bidang Kesehatan   | Referensi dalam pendisian tesis   | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya | 9  |
| 31 | 146/PPID.KKZ018 | 07 Mei 2018   | Penemuan dari PPID Kementerian | Asyifa Szami Iman    | Warga Negara Indonesia | 1. Belanja Modal Fungsi Kesehatan, APBD Realisasi Tingkat Kabupaten 2002 2. Realisasi Tingkat Kabupaten 2002 3. Belanja Barang Fungsi Kesehatan, APBD Realisasi Tingkat Kota/Kabupaten 2002 4. PAD Tingkat Kota/Kabupaten Tahun 2002   | Pengisian Skripsi   | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan sebagian   | 9  |



|    |                  |                  |                                |                           |                        |  |  |                              |                            |    |                                     |  |
|----|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|----|-------------------------------------|--|
| 49 | 298/PPID.KK/2018 | 09 Oktober 2018  | Penerusan dari PPD Kementerian | Faisol                    | Warga Negara Indonesia | Data anggaran belanja bidang pendidikan, kesehatan dan bidang infrastruktur kabupaten kota di Pulau Jawa periode tahun 2011-2018   | penyediaan pendataan anggaran  | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 5  |                                     |  |
| 50 | 273/PPID.KK/2018 | 09 Oktober 2018  | Penerusan dari PPD Kementerian | Afdakun Nisa              | Warga Negara Indonesia | Realisasi penerimaan retribusi daerah beserta rincian provinsi Jawa Tengah dan kabupaten kota pelatikan tahun 2005-2017  | sebagai referensi untuk tugas mata kuliah seminar ekonomi publik   | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 6  |                                     |  |
| 51 | 286/PPID.KK/2018 | 10 Oktober 2018  | Penerusan dari PPD Kementerian | Indra Basutan Tahir       | Warga Negara Indonesia | realisasi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota tahun 2008 s.d 2017  | Penelitian Disertasi   | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 5  |                                     |  |
| 52 | 302/PPID.KK/2018 | 18 Oktober 2018  | Penerusan dari PPD Kementerian | Nia Meylina               | Warga Negara Indonesia | Rincian data dana sebesar khusus bidang pendidikan per Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2013 sampai Tahun 2016  | untuk keperluan pendataan tugas akhir (skripsi)  | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 7  |                                     |  |
| 53 | 317/PPID.KK/2018 | 24 Oktober 2018  | Penerusan dari PPD Kementerian | Netri Dewantari           | Warga Negara Indonesia | Data Realisasi APBD per Fungsi tahun 1994-2017 per kabupaten   | Penelitian Tesis Evaluasi Dampak Pelaksanaan Promosi Produk Kelapa Per Kabupaten/Kota di Indonesia                   | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 3  |                                     |  |
| 54 | 322/PPID.KK/2018 | 25 Oktober 2018  | Penerusan dari PPD Kementerian | Inti Salamawati           | Warga Negara Indonesia | Data peta investasi fiskal 2005-2017   | skripsi  | Naskah Elektronik (Softcopy) | Diberikan sebagian         | 14 |                                     |  |
| 55 | 326/PPID.KK/2018 | 26 Oktober 2018  | Penerusan dari PPD Kementerian | Yusi Kusumawati           | Warga Negara Indonesia | realisasi belanja modal APBD menurut usulan, fungsi dan sektor ekonomi di pemerintah daerah TKI dan II provinsi Jawa Timur 2010-2017 (1 pompro dan 38 kabupaten) - data audited terakhir   | sebagai data dasar untuk penelitian tesis  | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 8  |                                     |  |
| 56 | 357/PPID.KK/2018 | 14 November 2018 | Penerusan dari PPD Kementerian | Yusuf Dwianto             | Warga Negara Indonesia | Data Anggaran dan Realisasi Belanja dalam 5 tahun terakhir Kabupaten Jember dan Kota Tulungagung Tahun 2011-2017 yang Ditinjau Menurut Fungsi, Ususan, dan Jenis Belanja   | Data Penelitian untuk tugas akhir Tesis pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 3  |                                     |  |
| 57 | 354/PPID.KK/2018 | 10 November 2018 | Penerusan dari PPD Kementerian | The Rizkyani Pratiwi      | Warga Negara Indonesia | Informasi Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan SILPA di Kabupaten Kalimantan Utara tahun 2013   | untuk penelitian atau skripsi  | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 6  |                                     |  |
| 58 | 332/PPID.KK/2018 | 30 Oktober 2018  | Penerusan dari PPD Kementerian | Yusuf Dwianto             | Warga Negara Indonesia | Data Anggaran dan Realisasi Belanja Seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011 s.d 2017 yang Ditinjau Menurut Fungsi, Ususan, dan Jenis Belanja  | Data Penelitian untuk tugas akhir Tesis pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 7  |                                     |  |
| 59 | 347/PPID.KK/2018 | 08 November 2018 | Penerusan dari PPD Kementerian | Luh Has Widhiast          | Warga Negara Indonesia | Data realisasi anggaran pendidikan dan kesehatan kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2011-2018  | untuk penelitian tugas akhir (skripsi)   | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 4  |                                     |  |
| 60 | 342/PPID.KK/2018 | 05 November 2018 | Penerusan dari PPD Kementerian | Watiwangih                | Warga Negara Indonesia | Data dana desa pertahun (alokasi dan atau realisasi) tahun 2014 s.d 2018 (sesuai dengan hasil koordinasi terhadap yang bersangkutan data yang diminta adalah dana desa per kabupaten tahun 2015-2018)                              | penyusunan tinjauan  | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 4  |                                     |  |
| 61 | 352/PPID.KK/2018 | 09 November 2018 | Penerusan dari PPD Kementerian | Yusi Kusumawati           | Warga Negara Indonesia | realisasi belanja modal APBD menurut usulan, fungsi, dan sektor ekonomi di kabupaten/kota TKI dan II provinsi Jawa Timur 2005-2008 (1 pompro dan 38 kabupaten) - data audited terakhir   | tesis  | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 4  |                                     |  |
| 62 | 334/PPID.KK/2018 | 30 Oktober 2018  | Penerusan dari PPD Kementerian | Eva Ayu Komaladewi Suyoto | Warga Negara Indonesia | dana anggaran tugas pembaruan level kabupaten tahun 2001-2004 seluruh Indonesia  | tesis  | Naskah Elektronik (softcopy) | Tidak diberikan seluruhnya | 5  | Informasi yang diminta tidak diuasi |  |
| 63 | 365/PPID.KK/2018 | 19 November 2018 | Penerusan dari PPD Kementerian | Eratinda Mangaraha        | Warga Negara Indonesia | realisasi anggaran pendidikan pada sektor pendidikan 2005-2017, level provinsi, 1 pada tingkat sekolah dasar (SD dan MI), 2 pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP dan MTs), 3 pada tingkat sekolah menengah atas (SMA dan MA) | referensi penelitian   | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 6  |                                     |  |
| 64 | 370/PPID.KK/2018 | 21 November 2018 | Penerusan dari PPD Kementerian | Eggy Guehman Nuryadi      | Warga Negara Indonesia | 1. Alokasi Dana Untuk Lingkungan Hidup 39 Provinsi 2009-2017 dari APBD.  | tesis  | Naskah Elektronik (softcopy) | Diberikan sebagian         | 6  |                                     |  |
| 65 | 367/PPID.KK/2018 | 21 November 2018 | Penerusan dari PPD Kementerian | Ndani Wiyadi              | Warga Negara Indonesia | 1. belanja infrastruktur menurut kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012-2018 (realisasi dan anggaran dari APBD) NIS, sektor kesehatan, untuk seluruh kabupaten di Indonesia tahun 2009-2017  | penelitian jurnal ilmiah dan tesis   | Naskah Elektronik (Softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 8  |                                     |  |
| 66 | 373/PPID.KK/2018 | 22 November 2018 | Penerusan dari PPD Kementerian | Watiwangih                | Warga Negara Indonesia | data pendapatan daerah agregat ekonomi di per-2014-2018 untuk seluruh pendataan yang PAD, Dana Perimbangan, dan lain2  | penyusunan paper   | Naskah Elektronik (Softcopy) | Diberikan seluruhnya       | 6  |                                     |  |



|    |                 |                  |                                |                    |                        |   |                 |                              |  |  |  |  |  |  |   |  |
|----|-----------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|---|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 67 | 388/PPID-KG2018 | 06 Desember 2018 | Penerusan dari PPD Kementerian | Hafiz Azam Achamni | Warga Negara Indonesia | 1. data jumlah SKPD pada setiap Kabupaten di provinsi serta jumlah pendapatan asli daerah pada setiap kabupaten kota di Indonesia<br>1. Nilai anggaran dan realisasi Belanja Infrastruktur Kabupaten/Kota menurut Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tahun 2013-2017 (dalam rupiah). 2. Nilai anggaran dan realisasi Belanja Infrastruktur Provinsi menurut Provinsi seluruh Indonesia tahun 2013-2017 (dalam rupiah) | penulisan paper | Naskah Elektronik (Softcopy) |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 68 | 387/PPID-KG2018 | 06 Desember 2018 | Penerusan dari PPD Kementerian | Rosalinda Regita   | Warga Negara Indonesia | realisasi APBD belanja modal untuk jalan, jembatan dan ingas serta sarana transportasi seluruh Kabupaten prov Bali 2013-2017  | skripsi         | Naskah Elektronik (Softcopy) |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 69 | 388/PPID-KG2018 | 11 Desember 2018 | Penerusan dari PPD Kementerian | Aarif Mardiansyah  | Warga Negara Indonesia |   | skripsi         | Naskah Elektronik (Softcopy) |  |  |  |  |  |  | 5 |  |

Sekretaris Direktorat Jenderal  
selaku  
PPID Tingkat I DJPK

  
Rukijo